

Buletin Kabair Desa

Vol. 4



**DIKUKUHKAN PJS BUPATI KUBAR,
IYAD SEGERA KOORDINASI INTERNAL**

**TOTAL DANA DESA DIBELANJAKAN
MENCAPAI RP 591,657 MILIAR**

**DPMPD RAIH PENGHARGAAN KIP 2020
KATEGORI MENUJU INFORMATIKA**

DIKAT MENUJU INFORMATIKA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA





H. M. Syirajudin,SH,MT
Kepala DPMPD Kaltim

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Allah SWT, saat ini telah terbit buletin yaitu KABAR DESA, Sajikan Seluk Beluk Kabar Tentang Desa.

Kami mengharapkan melalui buletin ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dapat memberikan informasi dan komunikasi dengan seluruh Penggiat Desa dimanapun berada, khususnya untuk 841 Desa di Kalimantan Timur, sekaligus sebagai sarana komunikasi atau media untuk mendukung Penyebaran Informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik.

Dewan redaksi mengucapkan apresiasi yang setinggi tingginya kepada seluruh Pegawai DPMPD Prov. Kaltim atas kontribusi yang besar sehingga buletin ini dapat terbit 3 bulan sekali

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada penulis yang telah berpartisipasi memberi kontribusi berupa berita yang termuat di www.dpmpd.kaltimprov.go.id

Akhir kata sebagai harapan kami, artikel dalam Buletin ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi pembaca dan segala kritik maupun saran untuk pengembangan dan kesempurnaan Buletin ini

DIKUKUHKAN PJS BUPATI KUBAR, IYAD SEGERA KOORDINASI INTERNAL



SAMARINDA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, M Syirajudin resmi dikukuhkan menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Barat (Kubar). Selama sekitar tiga bulan, Iyad sapaan akrab M Syirajudin akan menahkodai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten induk Kabupaten Mahakam Ulu ini.

Dikatakan Iyad, hal pertama yang akan dilakukannya saat melaksanakan tugas sebagai Pjs Bupati Kutai Barat segera melakukan koordinasi internal. Memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Tetap melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan Pak Bupati FX Yapan. Dan memastikan pelayanan tetap berlanjut. Harus tetap jalan. Tidak ada stag atau terhenti,” ujar M Syirajudin ketika dikonfirmasi se usai dikukuhkan bersama 4 Pjs Bupati dan Walikota Kaltim oleh Gubernur Kaltim Isran Noor, di Ruang Serba Guna Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (26/9).

Terlebih terkait administrasi. Dia berharap tetap berjalan sebagaimana mestinya dan diharap perlu ada percepatan penyelesaian saat dianggap krusial.

Sedangkan tugas memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada serentak, dia memastikan akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Forkopimda Kubar, KPU, Bawaslu, hingga Panwascam.

“Semoga pelaksanaan Pilkada lancar. Mohon dukungan semua pihak untuk mensukseskannya. Diantaranya dengan menjamin netralitas ASN, menjaga kamtibmas, serta membantu proses pendistribusian logistik pilkada di 16 kecamatan se Kubar yang terbatas sisi aksesibilitas,”katanya.

Pun demikian tugasnya sebagai ketua gugus tugas penanganan COVID-19 di Kubar. Dia akan memaksimalkan perannya dengan dukungan jajaran dan koordinasi baik semua pihak terlibat, diantaranya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan.

“Terpenting semoga masyarakat menerima kehadiran saya sebagai Pjs agar tugas dapat terlaksana dengan baik,”harapnya.

Seperti diketahui M Syirajudin dikukuhkan menjadi Pjs Bupati Kubar bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim Moh Jauhar Efendi menjadi Pjs Bupati Kutai Timur, Kepala Satpol PP Kaltim Gede Yusa menjadi Pjs Bupati Mahakam Ulu, Sekretaris DPRD Kaltim Ramadhan menjadi Pjs Bupati Berau, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim Riza Indra Riyadi menjadi Pjs Walikota Bontang.

Sebanyak 5 Penjabat Sementara (Pjs) Bupati dan Walikota Kaltim tersebut dikukuhkan Gubernur Kaltim, Isran Noor dengan dihadiri Wagub Kaltim Hadi Mulyadi beserta istri, Pj Sekprov Kaltim M Sabani beserta istri, unsur pimpinan Forkopimda Kaltim, serta diikuti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim secara virtual. (DPMPD Kaltim/arf)



IYAD SAMPAIKAN CATATAN PENTING HASIL KONSINYERING PEMBAHASAN REVISI RENSTRA

MARATUA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, M Syirajudin menyampaikan catatan penting terkait hasil konsinyering rapat pembahasan revisi Rencana Strategis (Renstra) DPMPD Kaltim 2019-2023.

Menurutnya, sasaran program kegiatan DPMPD dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (DPJMD) Kaltim 2019-2023 terkait peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) berkaitan erat peningkatan ekonomi desa.

“Terus terang hingga saat ini saya belum bisa memutuskan DPMPD masuk dukungan Misi I atau Misi II Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2019-2023. Sebab dari dulu sasaran program kita lebih terkait ekonomi atau tepatnya Misi II, bukan Misi I terkait peningkatan SDM, kepemudaan, dan disabilitas,”
sebut M Syirajudin yang akrab disapa Iyad saat menutup Konsinyering Pembahasan Renstra DPMPD Kaltim 2019-2023, di Aula Kantor Camat Maratua, Kabupaten Berau





Karenanya, jika seiring terbitnya Permendagri 90/2019 terkait klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bergeser dukungan Misi II dianggap kurang tepat.

Menurutnya, program kegiatan DPMPD dalam meningkatkan status IDM tidak ada sedikitpun kaitannya dengan sasaran Misi II terkait peningkatan kualitas SDM.

“Istilahnya jika dipersepsikan acuannya masuk Misi I itu masih awang-awang. Kalau Misi II sangat tepat,” katanya

Karenanya dia berharap konsinyering dapat menghasilkan formula terkait revisi renstra yang tepat. Hasilnya akan didiskusikan dengan BAPPEDA Kaltim sebagai instansi yang menangani urusan perencanaan pembangunan.

Sedangkan terkait pelaksanaan konsinyering pembahasan revisi renstra yang dilakukan dengan melibatkan Kabupaten Berau sebagai perwakilan kabupaten/kota se Kaltim sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan, dia menilai hal tersebut merupakan amanah terkait sinergitas program antara pusat, provinsi, kabupaten hingga ke desa.

Senada dengan itu, Ketua Panitia Kegiatan Surono menyebut tujuan konsinyering pembahasan revisi Renstra DPMPD Kaltim 2019-2023 untuk mensinkronkan dan mensinergikan rencana pembangunan tingkat nasional, provinsi kabupaten kota kecamatan dan desa kelurahan memperkuat koordinasi antar pelaku pembangunan di provinsi dan kabupaten kota, menjamin terciptanya integrasi sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar sektor provinsi dan kabupaten kota.

Sasaran kegiatan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan baik di provinsi maupun kabupaten kota, mengoptimalkan partisipasi masyarakat di semua tingkatan, mengidentifikasi dan mengangkat isu strategis pembangunan bidang PMD.

“Hasil yang diharapkan terwujudnya sinkronisasi dan integrasi serta sinergitas program dan kegiatan pembangunan bidang PMD antara pusat dan daerah. Dan output yang diharapkan tersusunnya kertas kerja revisi Renstra DPMPD Kaltim 2019-2023 sebagai acuan dalam penyimpanan dokumen Renstra DPMPD Kaltim,” katanya.

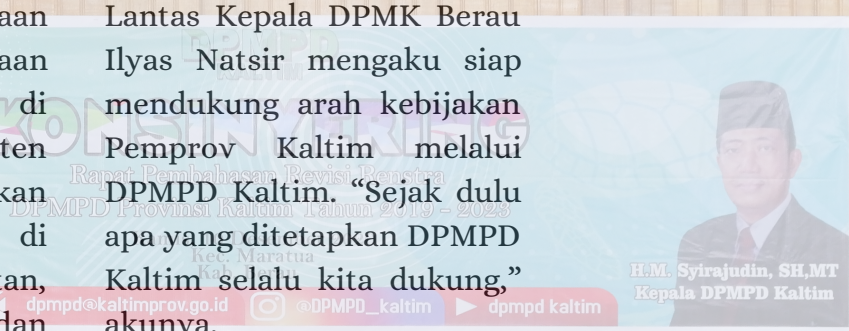
Sedangkan bagi kampung se Kecamatan Maratua sebagai lokasi kegiatan, dia berharap sebagai daerah 3 T (terdepan, terpencil, tertinggal) semakin maju dan berkembang ditandai meningkatnya status IDM.

Lantas Kepala DPMK Berau Ilyas Natsir mengaku siap mendukung arah kebijakan Pemprov Kaltim melalui DPMPD Kaltim. “Sejak dulu apa yang ditetapkan DPMPD Kaltim selalu kita dukung,” akunya.

Dukungan bahkan tidak hanya melalui penggunaan anggaran Negara, tapi juga bersumber dari terobosan pemanfaatan dana kepedulian sosial perusahaan (CSR) maupun lembaga organisasi non pemerintah.

Sementara Camat Maratua Marsudi mengaku bersyukur Kecamatan Maratua ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan. Dia berharap dapat meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat.

“Semoga kedatangan membawa berkah. Sebab Maratua ini bukan hanya masuk 3 T, tapi 5 T tambah terombang-ambing dan terdampar karena setiap akhir tahun jarang dikunjungi akibat gelombang tinggi sebagai daerah terluar Kaltim,” katanya.(DPMPD Kaltim/arf)



DPMPD RAIH PENGHARGAAN KIP 2020 KATEGORI MENUJU INFORMATIF



SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2020 kategori Menuju Informatif dengan nilai 83,39.

Penghargaan diserahkan Gubernur Kaltim Isran Noor kepada Kepala DPMPD Kaltim M Syirajudin yang diwakili Sekretaris Surono, di Anugrah Keterbukaan Informasi Publik 2020, di Atrium Bigmall Samarinda, Rabu (23/12).

Kategori Menuju Informatif dengan poin 80-89,9 merupakan satu level di bawah capaian terbaik Penghargaan KIP, yakni Kategori Informatif dengan poin 90-100. Dan di atas Kategori Cukup Informatif dengan nilai 60-79,9 serta Tidak Informatif dengan poin 0-39,9.

Kepala DPMPD Kaltim M Syirajudin yang diwakili Sekretaris Surono mengaku bersyukur atas penghargaan yang diraih DPMPD

“Setidaknya menunjukan DPMPD melaksanakan amanah UU14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). Terbuka terhadap semua yang bersifat informasi publik,”katanya.

Dia mengaku Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu DPMPD secara aktif mengelola informasi publik lingkup dinas. Semua yang bersifat informasi publik selalu disampaikan setiap saat, diminta ataupun tidak diminta melalui Website Resmi DPMPD Kaltim (dpmpd.kaltimprov.go.id).

Bahkan tidak jarang, informasi yang disampaikan menjadi bahan sumber berita media massa yang ingin memberitakan terkait bidang tugas DPMPD, seperti penyaluran Dana Desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya.

Setelah ini, Surono memastikan jajarannya akan tetap menerapkan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Targetnya bukan mengejar penghargaan, tapi bagaimana mewujudkan keterbukaan informasi publik lingkup DPMPD Kaltim. "Tapi jika meningkat menjadi informatif tentu menggembirakan,"timpalnya.



Penghargaan KIP 2020 diberikan dalam rangka hasil akhir Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi (SEMAKIN) PPID. Kategori Informatif diraih Dinas Perkebunan (95,13), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (92,16), Dinas Pangan dan Hortikultura (92,04), dan RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda (91,98).

Menuju Informatif DPMPD Kaltim (83,39) dan Diskominfo Kaltim (81,36). Sedangkan Cukup Informatif RSJD Atma Husada Mahakam (75,00), Dispora Kaltim (75,68), RSUD DR Kanujoso Djatiwibowo (69,08), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (69,03), dan Inspektorat (65,10).

Nampak hadir dalam penganugrahan Kepala Diskominfo Kaltim M Faisyal, Ketua Komisi Informasi Kaltim Ramaon D Saragih, dan kepala OPD lingkup kaltim peraih penghargaan.(DPMPD Kaltim/arf)

PUSAT PASTIKAN TPP 2021 TETAP BERLANJUT



SAMARINDA - Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memastikan tetap melanjutkan pemanfaatan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) 2021

"Pada prinsipnya TPP 2021 tetap berlanjut, hanya saja mekanisme kontrak TPP akan diambil alih sementara di pusat," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Syirajudin saat menyampaikan hasil koordinasi ke Dirjen PPMD Kemendes PDTT, Rabu (16/12).

M Syirajudin didampingi Sekretaris DPMPD Kaltim Surono dan Kasi Pembangunan Desa Isnawati.

Perubahan mekanisme kontrak TPP yang akan diambil alih sementara ke Pusat seiring adanya perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kemendes PDTT yang sesuai Permendes PDTT No 15 2020.

Hal tersebut diakui mendasari jajaran DPMPD Kaltim bersama DPMD Penajam Paser Utara koordinasi ke Dirjend PPMD Kemendes PDTT. Membahas keberlanjutan P3MD, khususnya pendampingan desa.

"Dalam rangka tindaklanjut pelaksanaan P3MD tahun 2021, khususnya tentang Pendampingan Desa pada tahun 2021," katanya.

Sementara Kasubdit Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa Dit. PMD Kementerian Desa PDTT Nursaid mengatakan pihaknya baru menerima kunjungan jajaran DPMPD Kaltim. Silaturahmi dengan Kepala DPMPD Kaltim beserta jajaran diskusi terkait keberlanjutan pendamping.

"Masih seperti tahun ini dan berlanjut thn depan. Yang penting evaluasi kinerja nya harus tetap sesuai yang ditetapkan," yakinnya sembari memberi salam hangat bagi seluruh TPP Kaltim. (DPMPD Kaltim/isna/arf)

KANWIL DJPB – DPMPD – TA P3MD KALTIM MOU PERTUKARAN DATA DAN FASILITASI DUKUNGAN PERMASALAHAN DESA

SAMARINDA – Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, dan Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Kaltim melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pertukaran data dan fasilitasi dukungan permasalahan desa di wilayah Provinsi Kaltim.

Penandatanganan MoU dilakukan Kakanwil DJPb Kaltim Midden Sihombing, Plh kepala DPMPD Kaltim Surono, dan TA P3MD Kaltim Alwani dengan protokol kesehatan ketat, di Ruang Terbuka Kantor Kanwil DJPb Kaltim, Rabu (30/10) sore

Surono menegaskan, DPMPD Kaltim sangat merespon positif semangat dilakukan penandatanganan MoU yang bertujuan mendorong percepatan penyaluran dan penyelesaian permasalahan Dana Desa di Kaltim.

Yang diimpikan sesuai tujuan pemprov dalam percepatan dan peningkatan akuntabilitas di Kaltim. Justru terima kasih dengan perhatian DJPb. Dan kita siap mendukung sesuai kewenangan yang ada jika diperlukan,” ujar Surono.

Dia bahkan mengaku menyambut baik niatan DJPb yang akan mengagendakan kegiatan semacam rakor terkait persiapan proses pencairan Dana Desa tahun 2021. “Terkait perlu rakor persiapan pencairan 2021 kita sangat sambut baik. Siap kolaborasi dan sinergitas,” yakinnya.

Sementara Midden Sihombing menyebut MoU diharap melandasi sinergitas antara pihak terkait dalam mengawal proses pencairan Dana Desa. “Tanpa MoU sebenarnya kita sudah kerja, tapi ingin lebih lengkap lagi. Bagaimana optimal penyaluran Dana Desa di Kaltim, sehingga bisa mensejahterakan rakyat desa sesuai tujuan digelontorkannya Dana Desa,” katanya

Dia berharap setidaknya MoU membuahkan hasil penyaluran Dana Desa 2021 harus sudah cair diminggu keempat Januari 2021. Karenanya dia bakal menggelar pertemuan daerah sebagai persiapan percepatan penyaluran Dana Desa 2021.

“Yang jelas kita harus bekerja lebih giat. Apalagi ini dalam pengawasan ombudsman dan media massa. Semakin cepat cair semakin cepat bisa digunakan untuk membangun desa dan mensejahterakan masyarakat desa. Apa yang dilakukan berkah buat orang banyak,” tandasnya. (DPMPD Kaltim/arf)

IDM DIHARAP JADI BASIS DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN



PASER – Plh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Suroño menyebut dalam perencanaan pembangunan desa hendaknya menjadikan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai basis data di level masing-masing.

“Saya berharap IDM menjadi basis data perencanaan pembangunan. Ditetapkan sesuai level masing-masing, baik provinsi, kabupaten, maupun desa,”sebut Suroño saat membuka Kegiatan Temu Pengelola Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi Terbangun (Pelaras), di Aula Desa Seniung Jaya, Paser Belengkong, Paser, Kamis (22/10).

Menurutnya, ada 52 indikator terkait penilaian IDM. Indikator yang dianggap lemahlah yang harus disasar diselesaikan untuk dapat meningkatkan status IDM desa.

Dia mengaku siap memfasilitasi membedah indikator yang perlu disasar dimaksud sesuai kewenangan masing-masing. Misalnya belum tersedia puskesmas atau PAUD bisa disasar perlakuan saran kegiatan agar indikator tersebut bisa mendongkrak level IDM.

Suroño berharap pada saatnya tidak adalagi desa berstatus sangat tertinggal di Kaltim. Jika target DPMPD dalam RPJMD Kaltim 2019-2023 meningkatkan status IDM 150 desa dari 518 desa berstatus sangat tertinggal dan tertinggal dari 841 desa, dia berharap capaiannya lebih dari target dengan sinkronisasi program kegiatan secara berjenjang.

“Semoga kucuran Dana Desa yang terbilang besar bisa digunakan menyentuh itu. Pun demikian kegiatan provinsi dan kabupaten yang menyasar desa diharap mengarah sasaran tersebut. IDM bukan tujuan utama, melainkan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,”katanya.(DPMD Kaltim/arf)

TEMU PELARAS DIHARAP WADAH KOMUNIKASI PAMSIMAS

PASER -- Temu Pengelola Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi Terbangun (Pelaras) dinilai merupakan kegiatan positif terjalannya komunikasi antar pemangku kepentingan dan tukar menukar informasi serta identifikasi permasalahan hambatan di lapangan yang dialami masyarakat dalam melaksanakan program penyediaan air minum dan sanitasi (Pamsimas)

"Melalui Kegiatan Temu Pelaras ini diharap dapat menjadi wadah komunikasi Pamsimas. Gilirannya diharapkan ketersediaan air minum dan sanitasi yang layak dapat terwujud pada masyarakat," ujar Plh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Surono saat membuka Kegiatan Temu Pelaras, di Aula Desa Seniung Jaya, Paser Belengkong, Paser, Kamis (22/10).

Karenanya dia berharap kegiatan ini menjadi agenda rutin dan dapat menjadi wadah evaluasi perkembangan sarana dan prasarana di desa.

Seperti diketahui pemenuhan kebutuhan dasar air minum dan sanitasi merupakan kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Program pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau yang sering dikenal dengan Pamsimas merupakan program unggulan dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang berorientasi kepada proses pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu secara mandiri dalam pemenuhan kebutuhan dasar air minum.

Keberhasilan program ini sangat bergantung dari adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat mengelola sarana dan prasarana air minum dan sanitasi terbangun.

"Ini sangat penting dalam rangka penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat," katanya.

Sementara Kades Seniung Jaya Sukardi mengaku bersyukur dengan adanya program pamsimas. Membantu masyarakat memenuhi ketersediaan air bersih.

"Sekarang air sudah bisa mengalir di rumah warga di 6 RT se Desa Seniung Jaya dengan jumlah penduduk 1.142 jiwa ini,"katanya.

Sebelum ada program pamsimas, masyarakat harus mengambil air sekitar 2 kilometer dan jika membeli di antar ke rumah seharga Rp80ribu- Rp100ribu per tandon 1.200 liter. Sekarang cukup Rp16ribu per tandon dan sudah bisa mengalir ke rumah warga.

Sebagai pendukung, Desa Seniung Jaya juga mengalokasikan dana pendampingan dari APBDes Rp35 juta dan Rp50 juta dari swadaya masyarakat untuk menunjang kegiatan pamsimas.

“Terimakasih pamsimas, sekarang warga bisa tersenyum melihat air mengalir ke rumah. Sekarang tinggal tanggung jawab warga masyarakat semua tanpa terkecuali memeliharanya. Karena membangun mudah, merawat yang susah,”katanya.

Kegiatan Temu Pelaras merupakan proyek perubahan diklat kepemimpinan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Kasi Pendayagunaan Saranan dan Prasarana, Noor Agustina. Kegiatan dihadiri Biro Administrasi dan Pembangunan Setprov Kaltim, Bappeda Kaltim, Dinas Kesehatan Kaltim, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim, Balai Prasarana Permukiman dan Wilayah Kaltim Koordinator ROM 13 Provinsi Kaltim, DPMD Paser, serta jajaran Desa Seniung Jaya.(DPMPD Kaltim/arf)



IYAD MINTA JAJARANNYA TUNTASKAN KEGIATAN SESUAI TARGET



SAMARINDA –Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, M Syirajudin memanfaatkan pelaksanaan tugasnya sebagai Pjs Bupati Kutai Barat di Kota Samarinda sekaligus memantau kinerja jajarannya di DPMPD Kaltim.

Dia mengumpulkan pejabat struktural di lingkungan DPMPD Kaltim untuk memantau progres pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020 yang sudah ditetapkan.

“Saya berharap semua jajaran DPMPD bisa memaksimalkan kinerjanya menuntaskan kegiatan yang sudah ditetapkan. Dituntaskan sesuai target akhir tahun anggaran,” kata M Syirajudin

Menurutnya, Gubernur Kaltim sudah membuat surat edaran tentang pelaksanaan administrasi keuangan berkenaan dengan akhir tahun anggaran 2020 dan awal tahun anggaran 2021 serta penyampaian laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Edaran tersebut hendaknya menjadi perhatian. Kegiatan yang belum terlaksana harus sudah selesai sebelum batas waktu realisasi anggaran dimaksud.

Pada kesempatan itu dia meminta laporan kinerja anggaran seluruh bidang yang ada hingga awal Oktober 2020. Kemudian mendengar rencana tindak lanjut kegiatan yang sudah ditetapkan.



“Semoga penyerapan anggaran kita baik, karena ini berpengaruh terhadap kinerja instansi secara keseluruhan. Dan tentunya tidak tercapainya target sasaran kegiatan yang ditetapkan,” harapnya.

Selain itu, dia juga meminta laporan perkembangan penilaian panji keberhasilan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan DPMPD Kaltim. Berdasarkan laporan yang disampaikan hampir sebagian besar kabupaten/kota sudah melakukan pengisian indikator penilaian yang ditetapkan DPMPD Kaltim.(DPMPD Kaltim/arf)

DPMPD LEVEL BIRU REALISASI AGGARAN 2020



SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan realisasi anggaran baik atau level biru (61 persen – 100 persen) hingga akhir Oktober 2020

.DPMPD dengan realisasi anggaran mencapai 63,32 persen menempati level biru bersama 13 OPD lain yang juga penyerapan anggarannya di atas 61 persen.

Demikian diungkapkan Sekretaris DPMPD Kaltim Surono ketika dikonfirmasi sesuai mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kaltim periode Januari - Oktober 2020 secara virtual, Kamis (5/11).

“14 OPD level biru dimaksud yakni RSUD AWS Samarinda RSJD Atmahasada Samarinda, DKP3A, Dishub Satpol PP, Biro PPOD, Disbun, Dinsos Disnakeswan, Bakesbangpol, DKP, DPMPD, Disnakertrans, serta DLH,” sebutnya.

Di bawahnya masih ada level hijau dengan presentase 56,1 hingga 61 persen ditempati oleh 13 OPD, kemudian level kuning 51,1 hingga 56 persen ditempati 8 OPD, dan level merah 0 hingga 51 persen ditempati 11 OPD.

Terkait sisa anggaran yang ada, Surono mengaku DPMPD sudah menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatannya sebelum batas akhir pelaksanaan anggaran.

“Semua ditargetkan selambat-lambatnya minggu keempat November semua sudah jalan. Saat ini sudah dimatangkan persiapannya oleh masing-masing bidang,” katanya.

Sebelumnya Gubernur Isran mengingatkan agar OPD dapat mempercepat realisasi kegiatan yang sudah ditetapkan. Mengingat saat ini sudah masuk akhir minggu pertama November.

“Bisa jadi ini Rapim TEPRA terakhir. Jadi program kegiatan OPD yang belum selesai, kiranya bisa secepatnya diselesaikan. Sedangkan yang baru siap-tender kegiatan fisik disarankan tidak usah dilanjutkan karena keterbatasan waktu,” katanya.

NORBAITI SERAHKAN HADIAH LOMBA KE TP PKK KUBAR

KUTAI BARAT – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kaltim Norbaiti Isran Noor menyerahkan hadiah lomba-lomba bagi TP-PKK Kutai Barat

Hadiah berupa piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada masing-masing pemenang disaksikan Pjs Ketua TP PKK Kutai Barat Suhelni M Sirajudin, di Sekretariat TP PKK Kutai Barat, Senin (9/11)..

Terlebih anggota PKK dalam mengabdikan tidak gaji. Gaji yang diterima berupa amal ibadah dari ALLAH SWT.

“Makanya harus sering-sering didatangi. Diberi semangat agar tetap memberikan pengabdian terbaik,”katanya.



“Selamat bagi para pemenang. Hadiah sengaja kami serahkan langsung bentuk penghargaan,”ujar Norbaiti.

Menurutnya juara merupakan bentuk kesungguhan anggota PKK melaksanakan pengabdian. Menunjukan mereka terbiasa melaksanakan program pokok PKK karena yang dilombakan berkaitan 10 program PKK.

Adapun hadiah yang diserahkan Juara Harapan I Panji-panji, Juara Harapan II Lomba Administrasi PKK, Juara I Hatinya PKK, Juara Harapan Lomba UP2K, Juara Harapan I Lomba PAAR.

Norbaiti Isran Noor menyerahkan penghargaan didampingi Ketua Pokja III TP PKK Kaltim Nor Hartati Ibrahim. Nampak hadir Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy Noor Fathoni.(DPMPD Kaltim/abdi/arf)

PJS BUPATI MINTA KUBAR DUKUNG PROKLIM PLUS

KUBAR – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Barat M Syirajudin meminta pemangku kepentingan Kabupaten Kutai Barat untuk ikut mendukung program Kampung Iklim (Proklam) Plus. Dia berharap Proklam Plus dapat meningkatkan status Indeks Desa Membangun (IDM) Kaltim yang menjadi target RPJMD Kaltim 2019-2023 melalui peningkatan indeks ketahanan lingkungan

Dukungan yang diperlukan dari Pemkab dan Pemerintah Desa/Kampung terhadap Proklam Plus dengan berpartisipasi aktif dalam mensukseskan Proklam plus dalam bentuk melakukan bedah IDM khususnya pada indeks ketahanan lingkungan (IKL) dan jika skoring masih rendah perlu ditingkatkan.

Kemudian mensinergikan Proklam Plus kedalam prioritas Dana Desa/Kampung, mensinergikan kebijakan Proklam plus ke dalam dokumen perencanaan kabupaten dan pemerintah kampung (RPJMD kab & RPJMDDes/kampung), menjabarkan program/kegiatan di kabupaten/kampung dalam dokumen tahunan RKPDes kab dan RKPDes/kampung, dan mengimplentasikan program/kegiatan Proklam plus dalam APBD kab & APBDes..



“Terakhir diharap dapat membudayakan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ke dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Pjs Bupati Kutai Barat M Syirajudin saat membuka Sosialisasi Program Kampung Iklim (ProKlim) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kutai Barat, Rabu (11/11).

Tujuan ProKlim mendorong pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat setempat untuk memahami permasalahan perubahan iklim dan dampaknya, serta melakukan tindakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara proaktif yang berkontribusi kepada upaya pembangunan nasional. Outputnya ProKlim desa rendah emisi.

Sementara ProKlim Plus merupakan Program Kampung Iklim berbasis pemberdayaan masyarakat, Sebagai bentuk partisipasi DPMPD terhadap ProKlim dan sesuai kewenangan yang ada, maka dilakukan sinergi ProKlim versi 2012 dengan IDM (Indeks Desa Membangun) dan dari 3 indeks kompositnya yaitu Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Sosial (IKS) difokuskan kepada komposit Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

Sehingga outputnya adalah selain desa rendah emisi juga desa yang IDM nya meningkat (ProKlim Plus),”katanya.

Sementara Plh Kepala DPMPD Kaltim Surono menyebut tujuan sosialisasi Program Kampung Iklim adalah memberikan pemahaman kepada Pemerintah Kampung dan Pendamping Profesional terhadap aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang bisa dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa.

“Secara khusus Sosialisasi Program Kampung Iklim bertujuan memberikan pengetahuan kepada Pemerintah Kampung dan Pendamping professional, memfasilitasi Pemerintah Kampung dan Pendamping Profesional dalam proses penyusunan RPJMDes dan RKPDDes, meningkatkan pemahaman Pemerintah Kampung akan pentingnya kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan menumbuhkan komitmen Pemerintah Kampung dalam berkontribusi dalam menurunkan emisi karbon dan meningkatkan indeks desa membangun,”ulasnya.

Sosialisasi Program Kampung Iklim diikuti peserta 28 orang Petinggi Kampung dan 12 orang dari Pendamping Profesional P3MD.

Setelah ini diharap Petinggi dan Pendamping Profesional mendapatkan pemahaman baru tentang Program kampung iklim, tersusunya rencana kerja tindak lanjut, dan memiliki sikap optimisme dalam menurunkan emisi carbon dan menaikkan indeks desa membangun (IDM).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kutai Barat Faustianus Syaidirahman berharap kegiatan dapat meningkatkan pemahaman lembaga kampung sehingga menjadi panduan pelaksanaan ProKlim Plus di Kabupaaten Kutai Barat.

Hadir sebagai narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kaltim Akbar, Dewan Daerah perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Timur Rizki Rahman dan perwakilan dari DPMPD Kaltim dan DPMK Kutai Barat. Nampak hadir Pjs Ketua PKK Kutai Barat Suhelni M Syirajudin.(DPMPD Kaltim/arf)

PEMBELAJARAN MANDIRI APARATUR DESA (PBMAD) TELAH DIMULAI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur melalui bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan melaksanakan program lanjutan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Pelatihan Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD) tahun 2020 dengan objek sasaran 25 (dua puluh lima) desa berdasarkan Renstra DPMPD Provinsi Kalimantan Timur.

Didalam target Renstra tersebut yakni meningkatkan status desa dari sangat tertinggal dan tertinggal menjadi berkembang, maju dan mandiri dengan tolak ukurnya adalah Indeks Desa Membangun (IDM).

“kegiatan PbMAD ini didasari oleh Renstra DPMPD Provinsi Kaltim dengan tujuan untuk meningkatkan status IDM dari suatu desa. Baik dari desa yang sangat tertinggal maupun tertinggal agar bisa menjadi meningkat status IDMnya menjadi desa berkembang, maju hingga mandiri” ucap kabid pemdeskel Kasmawati

Pelatihan Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD) tahun 2020 dilaksanakan di 6 (enam) Kabupaten yakni Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Mahakam Hulu. Kabupaten yang pertama dikunjungi dalam pelaksanaan PbMAD tahun 2020 ini di mulai dari Kabupaten Paser dengan diikuti 4 Desa sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.



Desa tersebut adalah Desa Kasungai, Desa Muara Pasir, Desa Muara Andeh dan Desa Tanjung Pinang. Peserta yang dihadiri oleh Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dimaksudkan untuk menerima pelatihan yang berkaitan dengan Perencanaan Desa/Kampung sehingga dapat meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM).

"yang kami harapkan sebagai fasilitator dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa ini tentunya untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Desa dan BPD sehingga dapat terjadi sinergitas yang baik antar pemerintah baik pemerintah pusat hingga kepada pemerintah desa. Tentunya ini semua menjadi tanggungjawab kami terutama terhadap desa-desa yang masih berada pada status desa tertinggal"sambung Kabid Pemdeskel Kasmawati

Tidak hanya Apartur Desa dan BPD yang hadir tetapi juga pejabat dilingkup Kabupaten Paser dan Pejabat dari masing – masing kecamatan yang menaungi desa tersebut. PbMAD dilaksanakan di Ruang Aula DPMPD Kabupaten Paser dengan mematuhi protokol kesehatan. Hadir juga tenaga ahli/pendamping dari P3MD bapak Asnan sebagai narasumber. (Pemdes/Ibrahim)

DPMPD MASUK TAHAP LANJUTAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2020



SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim masuk tahap lanjutan monitoring dan evaluasi (monev) sebagai badan publik Pemprov Kaltim dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2020.

DPMPD bersama lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemprov Kaltim mengikuti tahap presentasi monev KIP yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim sebagai PPID Utama Pemprov Kaltim.

“Terima kasih atas penilaian yang dilakukan PPID Utama atas kinerja DPMPD dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Semoga yang kita lakukan memenuhi tanggung jawab DPMPD sebagai badan publik memenuhi hak masyarakat untuk tahu sesuai amanat UU KIP, khususnya terkait pemenuhan informasi kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan DPMPD,” ujar Plh Kepala DPMPD Kaltim Surono ketika dikonfirmasi, Rabu (18/11).

Termasuk peran DPMPD Kaltim sebagai Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Satker P3MD) Kaltim merilis progres penyaluran dan penggunaan Dana Desa.

Surono berharap kinerja keterbukaan informasi publik yang sudah dilakukan selama ini gilirannya dapat mewujudkan target PPID Utama Pemprov Kaltim menjadi informatif atau peringkat terbaik KIP diatas menuju informatif, cukup informatif, dan tidak informatif.

Sedangkan hasil monev terhadap DPMPD, dia mengaku mempercayakan hasilnya terhadap tim yang sudah ditetapkan. “Kalau kita berbuat saja. Semua informasi publik diminta ataupun tidak diminta kita publish di website (<http://dpmpd.kaltimprov.go.id>), karena memang tidak ada yang ditutupi. Soal hasil kita serahkan kepada ALLAH SWT melalui perantara tim,”kataya.

Nantinya hasil monev menjadi dasar Diskominfo Kaltim melakukan pemeringkatan terhadap PPID Pembantu Pemprov Kaltim dengan penilaian informatif, menuju informatif, cukup informatif, dan tidak informatif.

Pada kesempatan itu dia juga mengapresiasi jajaran DPMPD, khususnya anggota PPID Pembantu yang sudah berupaya mewujudkan keterbukaan informasi lingkup DPMPD Kaltim. Termasuk persiapan dalam mengikuti tahapan lanjutan presentasi monev KIP 2020.

Hadir saat itu sebagai tim monev, Kasi Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Kaltim Sri Rejeki Marietha, Pranata Komputer Ahli Muda Fery, Pakar Komunikasi/Dosen Ilmu Komunikasi, FISIPOL Unmul Samarinda Silviana Purwanti, dan Pokja 30 Oky.

Sementara OPD yang masuk tahapan lanjutan penilaian mulai dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, DPMPD, Dinas Perkebunan, Diskominfo, dan RSUD AW Syahranié. (DPMPD Kaltim/arf)



TOTAL DANA DESA DIBELANJAKAN MENCAPAI RP 591,657 MILIAR

SAMARINDA – Total penggunaan dana desa di 841 desa se Kaltim hingga 18 November 2020 pukul 23.00 Wita mencapai Rp591,657 miliar atau 65,75 persen dari total pagu mencapai Rp899,887 miliar.

“Realisasi penyaluran dana desa hingga malam tadi mencapai Rp779,712 miliar atau 86,65 persen. Dan dari dana desa yang sudah realisasi tersebut sudah digunakan Rp591,659 miliar,”
sebut Kepala DPMPD Kaltim M Syirajudin

Rinciannya untuk kegiatan sapras Rp337,102 miliar atau 3 7,5 persen, kemudian non sapras yakni lain-lain Rp73,370 miliar atau 8,2 persen, COVID-19 Rp26,473 miliar atau 2,9 persen, dan BLT DD Rp154,712 miliar atau 17,2 persen

“Paling tinggi progres penggunaannya Kabupaten Kutai Barat yakni mencapai Rp136,349 miliar atau 76,7 persen dari total Pagu Rp177,923 miliar bersama Paser Rp91,869 miliar atau 73,37 persen dari total Pagu Rp125,217 miliar,” rincinya

Sementara yang realisasinya masih dibawah Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp591,657 miliar atau 65,75 persen, Kutai Timur sebesar Rp105,060 miliar atau 57,74 persen, dan Penajam 19,567 miliar atau masih 53,62 persen.

Dia berharap selain mendorong percepatan realisasi penyaluran dana desa, juga perlu dipercepat dalam proses penggunaannya. Mengingat saat ini sudah masuk minggu kedua November atau hanya tersisa enam minggu efektif hingga akhir tahun anggaran 2020.(DPMPD Kaltim/arf)

PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 PROV. KALTIM

NO	KABUPATEN	Σ KEC.	Σ DESA	TOTAL PAGU DANA DESA 2020 SETELAH PMK 35 TAHUN 2020	PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020					
					SARPRAS	NON SARPRAS			TOTAL	PROGRES
						LAIN LAIN	COVID 19	BLT DD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PASER	10	139	125.217.974.000	51.428.437.297	12.698.868.751	2.184.383.182	25.557.900.000	91.869.589.230	73,37%
2	KUKAR	16	193	185.547.777.000	55.302.865.896	15.749.080.977	6.520.020.704	39.828.100.000	117.400.067.577	63,27%
3	BERAU	12	100	115.138.296.000	47.751.959.380	14.090.699.097	3.585.184.925	11.059.800.000	76.487.643.402	66,43%
4	KUTAI BARAT	16	190	177.923.483.000	82.075.400.043	12.756.952.353	6.808.679.990	33.708.600.000	135.349.632.386	76,07%
5	KUTAI TIMUR	18	139	181.943.313.000	62.593.577.122	10.126.872.561	4.041.200.767	28.299.000.000	105.060.650.450	52,74%
6	PPU	4	30	36.490.369.000	11.932.062.948	869.110.132	1.227.743.234	5.538.900.000	19.567.816.314	53,62%
7	MAHULU	5	50	77.626.280.000	26.018.557.558	7.078.687.542	2.106.242.740	10.720.200.000	45.923.687.840	58,16%
	JUMLAH	81	841	899.887.492.000	337.102.860.244	73.370.271.413	26.473.455.542	154.712.500.000	591.659.087.199	65,75%
	PROGRES		100%	100%	37,5%	8,2%	2,9%	17,2%	65,7%	

DIKUNJUNGI SAUDARA TUA, DPMPD KALTIM – DPMD KALSEL KOORDINASI PENYUSUNAN RENSTRA

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menerima kunjungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalsel dalam rangka koordinasi penyusunan rencana strategis (renstra) dinas.

Kunjungan diterima Sekretaris DPMPD Kaltim Surono bersama jajaran terkait, di Ruang Rapat Kantor DPMPD Kaltim, Senin (7/12)

“Ini bentuk kunjungan balasan DPMD Kalsel setelah kita melakukan kunjungan pada 11 Desember 2020 lalu. Setelah silaturahmi diharap bisa terjalin komunikasi dan koordinasi antara Kaltim dengan Kalsel sebagai saudara tua (Kalsel sebagai provinsi induk Kaltim) kita,” kata Surono.

Dia berharap kedepan bisa diagendakan Rakor Regional Kalimantan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Mimpinya kedepan bukan sebatas membangun masing-masing provinsi, tapi bagaimana dengan koordinasi bidang PMD bisa mewujudkan desa yang maju secara bersama-sama di semua provinsi regional Kalimantan.

Sebagai permulaan, DPMD Kalsel sebagai saudara tua diharap mengawali menggagas pelaksanaannya. Sedangkan terkait mekanisme pembiayaan bisa dikomunikasikan apakah ditanggung bersama atau ditanggung provinsi tuan rumah pelaksanaan yang akan digilir ke setiap provinsi regional Kalimantan pertahunnya.

Sedangkan terkait penyusunan renstra yang menjadi sasaran kunjungan kerja DPMD Kalsel, dia menyebut bahwa saat ini Renstra DPMPD Kaltim 2019 - 2023 juga sedang tahap persiapan dilakukan revisi.

Revisi menyesuaikan kondisi terkini seiring implementasi permendagri 90/2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, pandemi COVID-19, dampak sosial dan ekonomi, serta revolusi industri 4.0



Selain itu, terjadi perubahan dukungan Misi Pembangunan Kaltim dari awalnya Misi II berubah ke Misi I, serta berkurangnya program prioritas yang semula 4 program menjadi 2 program.

“Pendekatan yang dilakukan melalui bedah Indeks Desa Membangun (IDM). Dibedah indeks mana yang masih lemah itu yang diplototi. Jika kewenangan DPMPD maka ditetapkan jadi target perencanaannya, sementara jika kewenangan desa disarankan menjadi sasaran desa,”katanya.

Kunjungan tersebut dipimpin Kasubid Keuangan dan Aset DPMD Kalsel Nurjani bersama pejabat dan jajaran terkait lingkup DPMD Kalsel.(DPMPD Kaltim/arf)

DANA DESA PENGUAT PEREKONOMIAN DITENGAH PANDEMI



SAMARINDA - Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mensosialisasikan Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan konsultasi publik rancangan peraturan pemerintah tentang BUMDes, di Ballroom Hotel Harris Samarinda, Selasa, (24/11/2020).

Kegiatan dibuka Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi didampingi Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nurdin dan Kepala DPMPD Kaltim M Syirajuddin.

"Terimakasih kepada anda semua karena telah membangun desa, penguat perekonomian disaat pandemi adalah dana desa," sebut Hadi diawal sambutannya.

841 Desa yang ada di Kaltim diharapkan dapat merasakan dana desa. Total anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat sejak 2015 - 2020 sebesar Rp. 3.983.745.634.000

Wakil Gubernur berharap dana sebesar itu bisa digunakan secara efisien untuk perkembangan perekonomian masyarakat di pedesaan.

**Untuk itu,
kedepan
program-
program
pembangunan
desa harus
benar-benar
dirasakan
manfaatnya
oleh warga desa
tanpa ada yang
terlewat,"
tambahnya.**

Sesuai dengan model pembangunan nasional yang berdasarkan pada Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) gagasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Permendes 13/2020 melahirkan SGD's Desa dimana dana desa 2021 diprioritaskan untuk mencapai 18 butir yang ada dalam SGD's Desa. (DPMPD Kaltim/*/arf)

Pembangunan desa dengan pemanfaatan dana desa yang telah berjalan selama ini namun masih memerlukan evaluasi dan langkah perbaikan.

Ada beberapa desa yang belum maksimal memanfaatkan dana desa ini. "Tidak ada yang sempurna dari 841 desa nanti kita akan evaluasi begitu pula dengan para pendamping agar bisa berjalan dengan baik," tegasnya.

ADAPTASI BMC UNTUK PENGEMBANGAN USAHA BUMDES BISA JADI ACUAN AWAL UNTUK BANGUN USAHA

Sangatta, DPMPD Prov. Kaltim melalui Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan TTG melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi perkembangan badan usaha mili desa dengan tema mengembangkan potensi lokal melalui bumdesa sebagai penggerak perekonomian desa. Acara terselenggara di ruang rapat DPMDesa Kab. Kutai timur pada hari Selasa 24 november 2020.

Acara dibuka oleh Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Wenadianto. beliau berpesan bahwa keberadaan Bumdes begitu penting karena bertujuan untuk membangun perekonomian desa.

"kami harap kegiatan seperti ini dilakukan terus menerus, dan tentu lain kali kami akan hadirkan aparatur desa, bumdes kab. kutai timur. kita ingin bumdes sebagai penggerak ekonomi desa" ujarnya.

Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat DPMPD Kaltim didapuk menjadi moderator kegiatan ini. Narasumber yang hadir adalah Direktur Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PDPAU) Kota Samarinda Khairul Fadly. Pada presentasinya, menjelaskan tentang mengadaptasi BMC untuk pengembangan bumdes. "BMC itu Business Model Canvas, sebuah metode untuk blue print usaha. Dalam membuat usaha, kita harus tahu mau usaha apa, bagaimana cara kita berpromosi, berapa banyak SDM yang kita miliki, hingga goal atau tujuan yang ingin didapat" ujar fadly

"Goal/ tujuan usaha itu harus jelas, hingga kita bisa menentukan cara apa yang dilakukan untuk mencapai goal tersebut, semakin matang perencanaan, semakin punya peluang untuk mencapai goal tersebut". jelasnya

Peserta pada kegiatan ini dari Desa Tanjung Mangkalihat, Sandaran, Spaso, keraitan, dan beberapa desa lainnya di Kab. kutai timur (dpmpd/yadi)



KETUA DAN WAKIL KETUA PKK SERAHKAN HADIAH LOMBA PKK TINGKAT PROVINSI

BERAU – Kabupaten Berau menjadi sasaran kunjungan kerja lanjutan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka penilaian Panji Keberhasilan Bidang PKK dan penyerahan hadiah lomba-lomba PKK Tingkat Provinsi Kaltim.

Setelah seharian menilai Panji Keberhasilan Bidang PKK, Tim yang dipimpin Ketua TP PKK Kaltim Norbaiti Isran Noor bersama Wakil Ketua TP PKK Kaltim Erni Makmur Hadi Mulyadi melanjutkannya dengan penyerahan piagam penghargaan dan hadiah Lomba PKK Tingkat Provinsi, di Tanjung Redeb, Berau, Selasa (24/11) malam.

Adapun pengharagaan yang diraih TP PKK Berau Juara II Posyandu, Juara I PHBS, Juara II Panji-Panji, Juara Harapan I Administrasi PKK, Juara III Hatinya PKK, Juara Harapan II UP2K, dan Juara II Lomba PAAR.

“Selamat atas prestasi yang diraih TP PKK Berau. Semoga ini menjadi penyemangat untuk berbuat lebih baik dalam mengabdikan diri,” ujar Norbaiti Isran Noor.

Hanya apresiasi dan semangat yang bisa diberikan bagi TP PKK atas dedikasinya yang dilakukan untuk TP PKK. Mengingat pengabdian yang diberikan tulus, karena tidak digaji.

“Biar ALLAH SWT yang menggaji pengabdian kita. Dengan diberikan kesehatan dan kesejahteraan bagi kehidupan keluarga kita,”ujarnya.

Dia berharap TP PKK Berau terus berkarya dan berinovasi membantu pemerintah sebagai mitra kerja Pemkab Berau dalam menyukseskan program yang ditetapkan hingga di tingkat kecamatan dan kampung. (DPMPD Kaltim/Mariah/arf)



DPMPD KALTIM BERSILATURAHMI KE DPMD KALTARA MEMBAHAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Bulungan, Rombongan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur melakukan Koordinasi dan Silaturahmi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara (26 November 2020)

Pada kesempatan ini, rombongan dari DPMPD Prov. Kaltim diketuai oleh Kepala Bidang Kawasan Perdesaaan, Riani Tisnadewi. "saya membawa lengkap kepala seksi, untuk mendengar perkembangan DPMD Kaltara, mungkin dari mendengar, dapat bertukar ide untuk membuat kebijakan tentang bidang pemberdayn masyarakat dengan lebih baik".

Kadis PMD prov. Kaltara, Amir Bakri menyambut baik kedatangan rombongan dari Kaltim.

"kami berterima kasih atas kedatangan dari prov. kaltim, suatu kehormatan kami dapat dikunjungi, semoga dari pertemuan ini kita bertukar informasi untuk kepentingan masyarakat desa" ujarnya

Kunjungan kali ini membahas berbagai masalah tentang Pendamping Profesional, tentang Pembangunan Kawasan Desa serta di tutup dengan berfoto bersama.

GUBERNUR SAMPAIKAN INSTRUKSI PRESIDEN SEGERA LAKSANAKAN KEGIATAN 2021

AMARINDA – Provinsi Kaltim bersama 10 kabupaten/kota se Kaltim menerima Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2021. Total anggaran untuk Kaltim sekitar Rp28 triliun dengan rinciannya sekitar Rp10 triliun lebih untuk instansi vertikal dan Rp18 triliun untuk instansi otonom.

Dalam arahannya, Gubernur Kaltim Isran Noor menyampaikan amanat Presiden RI Joko Widodo agar instansi vertikal maupun daerah segera melaksanakan kegiatan 2021. Tentunya didahului persiapan hal-hal teknis penunjang agar saat memasuki tahun anggaran 2021 bisa teralisasi.

Kemudian dalam pelaksanaannya mendatang diminta untuk didokumentasikan dan dilaporkan dengan baik sebagai pertanggung jawaban. Sebab salah satu tujuan penggunaan anggaran Negara untuk perbaikan ekonomi nasional dan daerah.

Menurutnya Presiden Joko Widodo mendorong pusat dan daerah melakukan percepatan penggunaan anggaran karena serapan anggaran 2020 terbilang tidak menggembirakan. Meskipun hal tersebut perlu difahami karena Indonesia dan Negara-negara di dunia sedang dihadapkan pandemi global COVID-19.

“Makanya saya sepakat segera dilaksanakan agar masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya. Tentunya dengan tatakelola akuntansi yang baik,”katanya.

“Itu yang utama. Tahun 2021 segera percepat pelaksanaan kegiatan dengan sasaran pemilihan ekonomi nasional. Dan percepatan reformasi,” kata Gubernur Isran

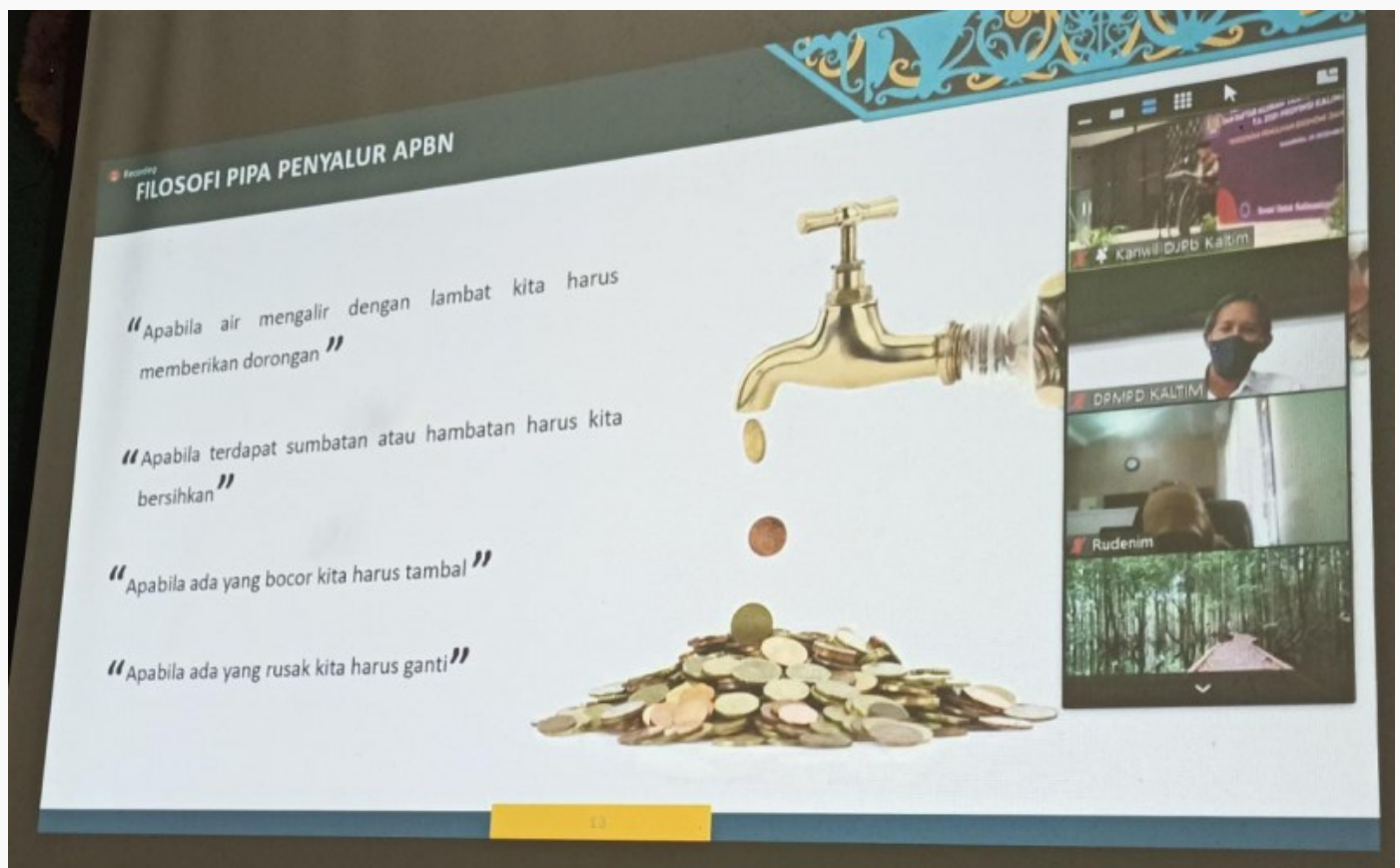


Senada dengan itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Kaltim Midden Sihombing mengaku pelaksanaan tahun anggaran tahun 2020 terbilang berbeda, karena dalam kondisi luar biasa akibat pandemi COVID-19.

“Karenanya untuk tahun depan perlu dilakukan perbaikan. Dan tahun ini yang berkinerja baik diberikan apresiasi berupa penghargaan sesuai kategorinya,”katanya.

Penyerahan DIPA dan Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2021 yang dirangkai penyerahan penghargaan pengelolaan keuangan tersebut juga diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim yang mengelola dana APBN secara virtual.

Diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim yang dihadiri Sekretaris Surono bersama bidang terkait pengelola kegiatan APBN terkait Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).(DPMPD Kaltim/arf)



"PERMINTAAN INFORMASI"



www.dpmpdkaltimprov.go.id



dpmpd@kaltimprov.go.id



[@DPMPD_kaltim](https://www.instagram.com/DPMPD_kaltim)



[dpmpd kaltim](https://www.youtube.com/dpmpd_kaltim)

Untuk Permintaan Informasi, Datang atau Kirim E-mail ke :

Jalan MT. Haryono NO. 96A Samarinda,
Telp. (0541) 7779725 atau Fax (0451) 7779726

Buka: 09.00

Tutup: 15.00

Atau Kirim Email : dpmpd@kaltimprov.go.id
dengan Subjek "Permintaan Informasi"

Kunjungi Website Kami di:
www.dpmpd.kaltimprov.go.id



www.dpmpd.kaltimprov.go.id



dpmpd@kaltimprov.go.id



[@DPMPD_kaltim](https://www.instagram.com/DPMPD_kaltim)



[dpmpd kaltim](https://www.youtube.com/dpmpd_kaltim)



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

**SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK YANG BERKUALITAS, CEPAT, MUDAH,
DAN AKURAT"**

PPID DPMPD PROV. KALTIM

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jauhar Efendi", written over a horizontal line.

MDR. JAUHAR EFENDI

NIP.19611216 198603 1 014

SELAMAT MEMASUKI MASA PURNA TUGAS**DPMPD**
KALTIM**DRA. RIANI TISNADEWI, MM**
KABID. PEMBANGUNAN
DESA DAN KAWASAN
PERDESAAN

■ ■

Terima Kasih Atas Pengabdian, Tenaga, dan Pikiran untuk Membangun Desa di Kalimantan Timur. Terima Kasih Juga Karena Menjadi Kolega, Rekan kerja, Teman, Sahabat, dan Orang Tua Bagi Kami, Selamat Menikmati Waktu Bersama Keluarga Tercinta ■ ■

Balikpapan, 10 Februariwww.dpmpdkaltimprov.go.iddpmpd@kaltimprov.go.id

@DPMPD_kaltim



dpmpd kaltim



IDM
Indeks Desa Membangun
2020
Provinsi Kalimantan Timur

DPMPD
KALTIM

H. M. Isran Noor, M.Si H.Hadi Mulyadi, SP.M.Si H.M. Syirajuddin, SH, MT
Gubernur Kaltim Wakil Gubernur Kaltim Kepala DPMPD Prov. Kaltim

Desa	Jumlah
Desa Mandiri	51
Desa Maju	202
Desa Berkembang	453
Desa Tertinggal	129
Desa Sangat Tertinggal	4

www.dmpdkaltimprov.go.id dmpdkaltimprov.go.id @DPMPD_kaltim dmpd kaltim



H.M. SYIRAJUDIN, SH, MT
Kepala DPMPD Kaltim

PENCEGAHAN AWAL VIRUS CORONA



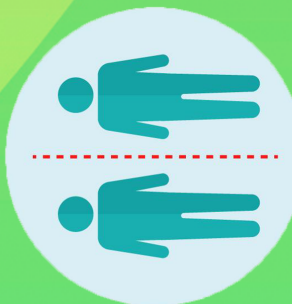
Basuh Tangan
dengan Sabun



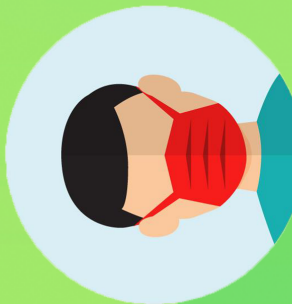
Tutupi Mulut dan Hidung
Jika Bersin Atau Pilek



Buang Bekas Tissue
ke Tempat Sampah



Jaga Jarak
Minimal 1 Meter



Pakai Masker



Jangan Sentuh Wajah



www.dpmpdkaltimprov.go.id



dpmpd@kaltimprov.go.id



[@dpmpd_kaltim](https://www.instagram.com/dpmpd_kaltim)



[dpmpd kaltim](https://www.youtube.com/dpmpd_kaltim)



**Mulai
Dari
Desa**

UU CIPTA KERJA

UNTUNGAN **MASYARAKAT DESA**



#YangTerbaikYangTerbatik

#TerbaikTerbatikKemendesPDTT



Kemendesa.1



Kemendesa pdtt



KemenDesa



Kemendespdtt



Kemendesa.go.id

diunduh di : https://www.kemendesa.go.id/berita/index.php/content/infografis_kdpdtt/

BUMDes dan UMK lebih mudah mendirikan PT (Perseroan Terbatas) (Pasal 109)

- Pendirian PT perorangan dapat dilakukan oleh BUMDes dan UMK.

PT untuk UMK

- diberikan keringanan untuk biaya pendirian



#YangTerbaikYangTerbatik

#TerbaikTerbatikKemendesPDTT



Kemendesa.1



Kemendesa pdtt



KemenDesa



Kemendespdtt



Kemendesa.go.id

diunduh di : https://www.kemendesa.go.id/berita/index.php/content/infografis_kdpdtt/

Penetapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan hukum

Memudahkan kerjasama bisnis,
Terbukanya akses permodalan,
BUMDes dapat menjalankan
usaha di bidang ekonomi,
dan/atau pelayanan umum
(Pasal 117)



#YangTerbaikYangTerbatik

#TerbaikTerbatikKemendesPD TT

f Kemendes.1

▶ Kemendesa pdtt

✈ KemenDesa

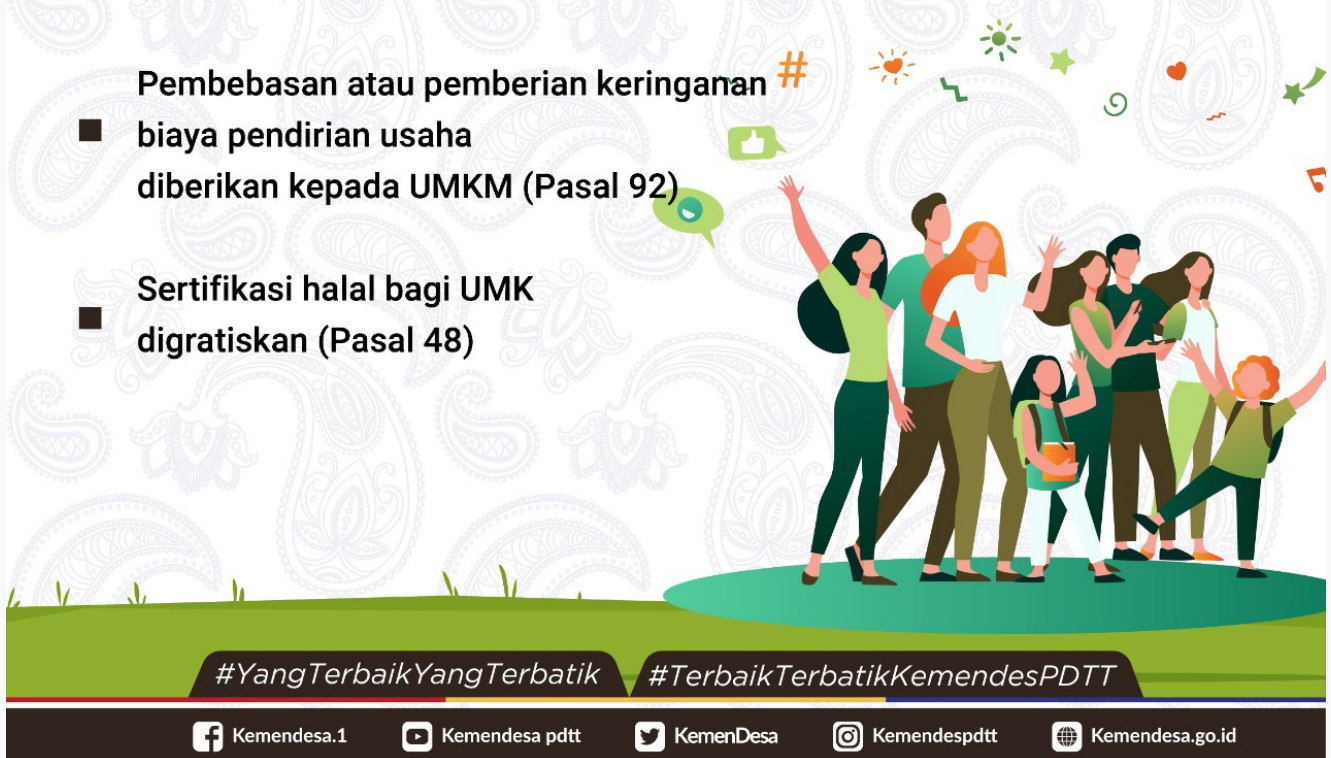
📷 Kemendespdtt

🌐 Kemendesa.go.id

diunduh di : https://www.kemendesa.go.id/berita/index.php/content/infografis_kdpdtt/

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM

- Pendirian koperasi primer cukup beranggotakan 9 orang, dan dapat menjalankan prinsip usaha syariah (Pasal 86)
- Pendirian UMKM cukup dengan mendaftar, tidak lagi harus izin (Pasal 91)
- Pembebasan atau pemberian keringanan biaya pendirian usaha diberikan kepada UMKM (Pasal 92)
- Sertifikasi halal bagi UMK digratiskan (Pasal 48)



diunduh di : https://www.kemendesa.go.id/berita/index.php/content/infografis_kdpdtt/



ayo wujudkan

INDONESIA MAJU TANPA NARKOBA



Prekursor narkoba psikotropika merupakan bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pembuatan narkoba atau psikotropika.



Tercatat 40-an orang per hari yang meninggal dunia akibat menjadi pengguna narkoba



Narkoba merupakan kejahatan lintas negara dan tergolong kejahatan luar biasa



diunduh di : https://www.kemendesa.go.id/berita/index.php/content/infografis_kdpdtt/

